

**PENGARUH KOMPETENSI PENGELOLA KEUANGAN DAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**RISTA OKTAVIA Br MANALU
NPM. 2002110020**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 06 Maret 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RISTA OKTAVIA BR MANALU
NPM. 2002110020

Dengan judul:

**PENGARUH KOMPETENSI PENGELOLA KEUANGAN DAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

H, Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA
NIK : 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

Syamsidar, SE., M.Si., Ak
NIK: 19730921 199901 2 001

Pembimbing II

Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si
NIK : 19871208 201306 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si. MM
NIK : 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA

TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092

BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 06 Maret 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RISTA OKTAVIA BR.MANALU
NPM. 2002110020

Dengan judul:

**PENGARUH KOMPETENSI PENGELOLA KEUANGAN DAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 11 Februari 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si. MM
NIK : 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Syamsidar, SE., M.Si., Ak
NIK: 19730921 199901 2 001

Anggota

Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si
NIK : 19871208 201306 2 001

Anggota

H. Mulyadi AR, SE, M.Si
NIK : 19620917 200204 1 001



Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkarnain Umar, SE, M.Si, Ak. CA
NIK : 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 06 Maret 2023
Yang Menyatakan



RISTA OKTAVIA BR MANALU

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RISTA OKTAVIA BR MANALU
NPM : 2002110020
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH KOMPETENSI PENGELOLA KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 06 Maret 2023

Banda Aceh, 06 Maret 2022
Yang Menyatakan



RISTA OKTAVIA BR MANALU

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.”** Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik di dalam isi maupun teknik penulisannya. Oleh karena itu dalam segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang mulia Ayahanda dan Ibunda yang tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memberikan perhatian dan dorongan serta doa yang tiada hentinya, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dari dasar hingga ke jenjang sarjana.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

3. Bapak Zulkifli Umar, SE., M.Si. Ak.CA selaku Ketua Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Syamsidar. SE., M.Si, Ak. selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Intan Rizkia Chudri, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak menyumbangkan waktu dan pikirannnya demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si, selaku Ketua Laboratorium Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu penulis selama masa kuliah.
8. Teman-teman satu angkatan terutama jurusan akuntansi yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih banyak atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Amin

Banda Aceh, Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	10
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	11
2.1. Landasan Teoritis	11
2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan	11
2.1.1.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan	11
2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan	16
2.1.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan	17
2.1.1.4 Indikator Kualitas Laporan Keuangan	19
2.1.2 Kompetensi pengelola Keuangan	19
2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	23
2.2. Penelitian Sebelumnya	30
2.3. Kerangka Pemikiran	34
2.3.1 Hubungan Kompetensi pengelola Keuangan Terhadap dengan Kualitas Laporan Keuangan	34
2.3.2 Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	35
2.4. Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Desain Penelitian	38
3.1.1 Tujuan Penelitian	38
3.1.2 Jenis Penelitian	38
3.1.3 Horizon Waktu	39
3.1.4 Unit Analisis	39
3.2. Populasi dan Sampel	40
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	42
3.4. Skala Pengukuran	42
3.5. Definisi dan Operasionalisasi Variabel	43
3.6. Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis	45

3.6.1	Metode Analisis	45
3.6.2	Analisis Persepsi Responden	48
3.6.3	Analisis Regresi Linier Berganda	49
3.6.4	Pengujian Hipotesis	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.2.	Deskripsi Variabel	53
4.2.1	Variabel Kualitas Laporan Keuangan	54
4.2.2	Variabel Kompetensi Pengelola Keuangan	55
4.2.3	Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	56
4.3.	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	57
4.3.1.	Uji Validitas	57
4.3.2.	Uji Reliabilitas	58
4.4.	Uji Asumsi Klasik	59
4.4.1	Uji Normalitas	59
4.4.2	Uji Multikolinieritas	62
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas	63
4.5.	Analisis Regresi Linier Berganda	65
4.5.1	Pengaruh Variabel Independent Terhadap Variabel Dependent	65
4.5.2.	Koefisien Regresi (β)	66
4.5.3.	Koefisien korelasi (R) dan determinasi (R^2)	66
4.5.4.	Pengujian Secara Parsial (Uji-t)	67
4.5.5.	Pengujian Secara Simultan (Uji-F)	69
4.5.6.	Pembuktian Hipotesis	70
BAB V	KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	75
5.1.	Kesimpulan	75
5.2.	Keterbatasan	75
5.3.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	32
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	40
Tabel 3.2 Skala Likert	42
Tabel 3.3 Definisi dan Operasionalisasi Variabel	44
Tabel 4.1 Responden Penelitian Setelah Penelitian	53
Tabel 4.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan	54
Tabel 4.3 Indikator Kompetensi pengelola Keuangan	55
Tabel 4.4 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas	57
Tabel 4.6 Reliabilitas Variabel Penelitian (Alpha)	59
Tabel 4.7 Uji Normalitas	60
Tabel 4.8 Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas	62
Tabel 4.9 Pengaruh Masing-masing Variabel Bebas Terhadap Variabel terkait	65
Tabel 4.10 Tabel Model Summary	67
Tabel 4.11 Uji Parsial (t-test)	67
Tabel 4.12 Analisis of Variance (Anova)	69

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	2.1 Flowchart Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	24
Gambar	2.2. Skema Kerangka Pemikiran	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	82
Lampiran 2. Master Tabel Karakteristik Responden	85
Lampiran 3. Master Tabel Pernyataan Kuesioner	88
Lampiran 4. SPSS Out Put	92
Lampiran 5. Titik Kritis	104

**PENGARUH KOMPETENSI PENGELOLA KEUANGAN DAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR**

**RISTA OKTAVIA BR MANALU
NPM. 2002110020**

Pembimbing : 1. Syamsidar. SE., M.Si, Ak.
2. Intan Rizkia Chudri, SE., M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan, baik secara simultan maupun secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan studi kausal dengan jenis investigasi dengan pengujian hipotesis. Jumlah sampel sebanyak 81 orang pegawai bagian keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program *SPSS V.22.0 For Windows*.

Hasil penelitian diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel independet terhadap variabel dependent tidak sama dengan nol. Selanjutnya masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari pada tingkat signifikansi (0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Secara simultan diketahui juga bahwa kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar, dengan nilai koefisien korelasi (R) = 0,521 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 52,1%. Sedangkan koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,271. Artinya bahwa kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Aceh Besar sebesar 27,1%, selebihnya 72,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor variabel lain di luar daripada yang menjadi variabel dalam penelitian ini.

Kata kunci : kompetensi pengelola keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas laporan keuangan

THE INFLUENCE OF THE COMPETENCE OF FINANCIAL MANAGERS AND REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS IN THE WORK UNITS OF REGIONAL DEVICES IN ACEH BESAR DISTRICT

By. RISTA OKTAVIA BR MANALU
Student Number : 2002110020

Supervisor : 1. Syamsidar. SE., M.Si, Ak.
2. Intan Rizkia Chudri, SE., M.Si

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of financial management competencies and financial accounting systems, both simultaneously and partially on the quality of financial reports in the Regional Working Units of Aceh Besar District. This research is a causal study with the type of investigation by testing the hypothesis. The number of samples was 81 employees of the finance section at the Aceh Besar District SKPD. Data was collected through a questionnaire and then processed and analyzed using multiple linear regression with the help of the SPSS V.22.0 For Windows program.

The results of the study show that the value of the independent variable's regression coefficient on the dependent variable is not equal to zero. Furthermore, each variable has a significance value that is smaller than the significance level (0.05), so it can be concluded that partially the competence of financial management and the financial accounting system has an effect on the quality of financial reports in the Aceh Besar District SKPD. Simultaneously it is also known that the competence of financial management and the financial accounting system together influence the quality of financial reports in Aceh Besar District SKPD, with a correlation coefficient (R) = 0.521 which indicates that the degree of relationship between the independent variable and the dependent variable is 52, 1%. While the coefficient of determination (R^2) is 0.271. This means that the competence of financial managers and regional financial accounting systems affects the quality of SKPD Aceh Besar District financial reports by 27.1%, the remaining 72.9% is influenced by other variable factors than those that are the variables in this study.

Keywords: competence of financial managers, regional financial accounting systems, quality of financial reports

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Laporan keuangan merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah daerah bagi pemerintah pusat berkepentingan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah karena pemerintah pusat telah memberikan sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBN/APBD yang tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki tujuan untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan entitas pelapor yang berguna bagi pengguna dalam membuat

dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Berdasarkan tujuan tersebut maka laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan memiliki kualitas.

Untuk menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas, dibutuhkan pengelola keuangan yang kompeten dalam bidangnya. Kompetensi merupakan keahlian yang dimiliki seseorang melalui pendidikan dan pelatihan untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan tugasnya (Hardiansyah, 2016). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah penting karena salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Apabila laporan keuangan sudah dapat memberikan manfaat dalam membuat keputusan maka akan mendorong percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah. Kompetensi pengelola keuangan itu sendiri merupakan kemampuan sumber daya manusia (SDM) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Kompetensi pengelola keuangan yang berkompeten dan handal sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Jika SDM mempunyai pengetahuan dalam menyusun laporan keuangan maka SDM akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sebaliknya jika SDM tidak mempunyai atau kurang memahami pengetahuan dalam menyusun laporan keuangan maka SDM akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak berkualitas.

Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Hervesi, 2005:45).

Sumber daya manusia dalam hal ini pengelola keuangan, jika tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat, hal ini karena pengelola keuangan tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan dengan demikian laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas (Mardiasmo, 2018:146).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik berdasarkan standar akuntansi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai

dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah (Permendagri No. 64 Tahun 2013).

Selain kompetensi pengelola keuangan, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan juga tidak baik (Mardiasmo, 2018:35).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Sedangkan dalam permendagri No. 13 Tahun 2006 diungkapkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Laporan keuangan berkualitas dapat dilihat dari opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ada strata penilaian laporan keuangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan strata tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian selanjutnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Selain opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat juga apabila telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disusun melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, informasi keuangan tidak terdapat penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, dan disajikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kriteria dan unsur-unsur pembentuk Kualitas Laporan Keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan dan 4) dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan masa depan; Andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi; Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan dapat dipahami oleh penggunanya.

Berdasarkan Fenomena di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dapat dilihat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan

Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada tanggal 27 April tahun 2022 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Besar secara berturut-turut dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, Namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mendapati sejumlah temuan baik yang menyangkut dengan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan (Pemkab Aceh Besar, 2022).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) itu sendiri tertuang dalam Permendagri Nomor 4 tahun 2008, yang menjelaskan bahwa SPI merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi kriteria pemberian opini melalui evaluasi atas efektivitas SPI.

Dalam hal ini, kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Kabupaten Aceh Besar di antaranya pengelolaan pendapatan asli daerah, penerimaan infak dan sadakah belum di anggarkan dalam APBK, pengelolaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi JKN belum tertib dan pengelolaan kas belum sepenuhnya dilakukan secara memadai. Yang terbaru adalah hasil pemeriksaan BPK berupa LHPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan) atas Belanja Daerah tahun 2021 yang diserahkan pada tanggal 7 Januari 2022, ditemukan pokok-pokok yang mengindikasikan kelemahan SPI, diantaranya pertama pada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kanopy Aula, Tempat Belajar

dan BLK Disnakertrans Tidak Dapat Dibayarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemkab Aceh Besar belum melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebagaimana mestinya (BPK RI, 2022).

Temuan BPK selanjutnya adalah Kelebihan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Pemkab Aceh Besar; Pembayaran Honorarium Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah pada Pemkab Aceh Besar Memboroskan Keuangan Daerah; serta Kelebihan Pembayaran atas Sembilan Paket Pekerjaan pada Tujuh SKPK. Dari temuan ini, dapat diketahui bahwa kompetensi pengelola keuangan di Pemkab Aceh Besar masih tergolong rendah. Sumber daya manusia yang ada dalam hal ini pengelola keuangan memiliki kompetensi yang masih rendah sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Sehingga kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan handal sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Sedangkan temuan BPK yang terakhir adalah Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Pengolahan Tanah Gratis Tidak Memadai dan Belum Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap. Temuan ini juga memperkuat dugaan lemahnya sistem akuntansi keuangan daerah di Pemkab Aceh Besar. Seharusnya sistem akuntansi keuangan daerah Aceh Besar mampu memberikan informasi yang kredibelitas adalah informasi yang handal dapat dipercaya (*reliable information*) dan sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja serta mengidentifikasi risiko. Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa sistem akuntansi keuangan daerah di Pemkab Aceh Besar belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.

Kemudian ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Kabupaten Aceh Besar di antaranya bendahara penerimaan belum menyetorkan PAD atas retribusi pelayanan, penggunaan langsung pendapatan daerah atas retribusi sewa alat pertanian, kekurangan pendapatan bunga deposito dan mekanisme pemberhentian pegawai yang terkena kasus hukum belum sesuai ketentuan (LHP BPK, 2022).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar
2. Apakah kompetensi pengelola keuangan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar
2. Untuk menguji pengaruh kompetensi pengelola keuangan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar
3. Untuk menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada penulis mengenai kompetensi pengelola keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi ataupun sebagai data bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Aceh khususnya Instansi pemerintah di Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan kinerja.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan informasi sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan dan keputusan para rekanan dan mitra kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya pada kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Penulis membatasi wilayah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian hanya pada personal bagian keuangan SKPD, dalam hal ini yang dikatakan bagian keuangan yaitu beberapa pegawai bagian keuangan dan akuntansi yang bertugas di SKPD Kabupaten Aceh Besar. Kompetensi pegawai dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tersebut mencerminkan kualitas laporannya.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan juga merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga laporan keuangan pemerintah tersebut dikatakan baik jika bisa memberikan informasi yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pengguna. Selain itu, kualitas laporan keuangan dilihat dari karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh laporan keuangan dan bagi pemerintah menyajikan laporan keuangan yang berkualitas merupakan sebuah keharusan.

Menurut Tjiptono (2014:51), kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip akuntansi serta dapat dipahami oleh pemakai informasi.

Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas, informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya, laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika laporan keuangan yang diinformasikan disajikan dengan valid dan dapat diandalkan. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinya laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga didalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian, tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampainnya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri, (Mahmudi, 2017: 9).

Menurut Yosefrinaldi (2016:3), Rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disebabkan oleh kapasitas kompetensi pengelola keuangan yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi.

Menurut Yadiati (2017:32) kualitas pelaporan keuangan adalah Kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar. Sedangkan menurut Nurillah (2017:45), kualitas laporan keuangan adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya untuk mengukur kualitas dari sebuah laporan keuangan, dalam hal ini adalah laporan keuangan daerah, menurut Erlina & Rasdianto (2018:8) ada beberapa indikator yang dapat dipakai dalam mengukur kualitas laporan keuangan daerah yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal yang hampir sama juga dikemukakan Mahmudi (2017:2) bahwa untuk mengukur kualitas kualitas laporan keuangan daerah dapat menggunakan beberapa indikator yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Penerapan Sistem Akuntansi Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No.13 Tahun 2006 pasal 232).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat baik buruknya suatu laporan keuangan pemerintah daerah dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar. Oleh karenanya, proses pelaporan keuangan pemerintah harus dikerjakan oleh SDM yang memiliki kompetensi agar mampu menyusun dan menyajikan LKPD yang berkualitas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari empat karakteristik dan merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Informasi yang relevan meliputi hal-hal sebagai berikut :

a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu,

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap,

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan dikatakan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami apabila disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan mempunyai pengetahuan mengenai kegiatan operasi entitas pelaporan.

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, atau politik. Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan intansi menurut Setyowati (2016), yaitu :

1. Pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah
2. Kompetensi pengelola keuangan
3. Peran internal.

Setyowati (2016), memberikan penjelasannya dari faktor-faktor kualitas laporan keuangan tersebut sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah (SIKDA) menyebutkan bahwa sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah

dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

2. Kompetensi pengelola Keuangan

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dalam perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.

3. Peran Internal

Internal auditing merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk member lain tambah dan mengingatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal auditing membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Yuhanis (2017), mengemukakan bahwa baik tidaknya kualitas sistem informasi akuntansi akan mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan itu sendiri, dimana laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan keuangan lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara, seperti misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana.

Mardi (2016) Menegaskan bahwa salah satu faktor pendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik.

2.1.1.4 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan indikator, antara lain:

1. Relevan. Laporan Keuangan dikatakan relevan apabila informasi dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta dapat mengoreksi hasil evaluasi masa lalu. Informasi yang relevan bercirikan memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, memiliki manfaat umpan balik, dan lengkap.
2. Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, dapat diverifikasi, dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai.
4. Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

2.1.2 Kompetensi pengelola Keuangan

Dalam UU No. 17 tahun 2003 diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang meliputi, akuntabilitas yang berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan; dilakukan

pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Selanjutnya, dalam pengelolaan keuangan negara tersebut diperlukan kompetensi dari pengelolanya.

Menurut Rosanti (2017:3), kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan dan wewenang. Adapun secara etimologi kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan, dan perilaku yang baik. Kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Berdasarkan definisi tersebut mengandung makna kompetensi adalah bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Kompetensi adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk meng-hasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Ihsanti, 2017:7).

Kompetensi diartikan sebagai pengekspresian atau pengungkapan sebagai perilaku sedangkan istilah *competences* digunakan untuk menunjukkan ekspresi standar. Organisasi-organisasi sektor swasta (*the private sector*) cenderung menggunakan competency model, sedangkan yang bergerak di sektor publik (*the public sector*) menggunakan *competence* model. Kompetensi sendiri dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), atribut personal, dan pengetahuan (*knowledge*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi (Yusriadi, 2017:3).

Manusia merupakan sumber daya penting dalam usaha organisasi mencapai keberhasilan yang dapat menunjang organisasi melalui karya-karya, bakat, kreatifitas dan dorongan. Betapapun sempurnanya aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai. Kompetensi pengelola keuangan merupakan salah satu unsur masukan (input) yang bersama unsur lainnya seperti mesin dan teknologi diubah melalui proses manajemen menjadi keluaran (*output*) berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan atau organisasi (Wulandari, 2020:12).

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan/tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan (Wicaksono, 2017:5).

Untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti diisyaratkan oleh prinsip etika (Mulyadi, 2012:58). Komponen kompetensi untuk auditor di Indonesia terdiri atas :

1. Komponen pengetahuan, yang merupakan komponen penting dalam suatu kompetensi. Komponen ini meliputi pengetahuan terhadap fakta-fakta, prosedur-prosedur dan pengalaman.
2. Ciri-ciri psikologi, seperti kemampuan berkomunikasi, kreativitas, kemampuan bekerja sama dengan orang lain.

3. Kemampuan Berfikir merupakan kemampuan untuk mengakumulasi dan mengolah informasi. Karakteristik yang dapat dimasukkan sebagai unsur kemampuan berfikir adalah kemampuan beradaptasi pada situasi yang baru dan ambigu, perhatian terhadap fakta-fakta yang relevan dan kemampuan untuk mengabaikan fakta yang tidak relevan.
4. Strategi Penentuan Keputusan baik formal maupun informal akan membantu membuat keputusan yang sistematis dan membantu keahlian di dalam mengatasi keterbatasan manusia.

Ada beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi yaitu sebagai berikut (Rosanti, 2017:4):

- 1) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seseorang pegawai mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di organisasi;
- 2) Pemahaman (*understanding*), yaitu didalam kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seseorang pegawai dalam melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara afektif dan efisien;
- 3) Kemampuan (*skill*), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan pegawai dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien;
- 4) Nilai (*value*), standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku para pegawai dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis);
- 5) Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji, dan sebagainya;
- 6) Minat (*interest*), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya melakukan sesuatu aktifitas kerja.

Kompetensi pengelola keuangan merupakan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar dan lain-lain (Sholeh, 2017;10).

Indikator kompetensi SDM adalah sebagai berikut (Sholeh, 2017;10):

- 1) Kemampuan, yaitu yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental berpikir, menalar, dan memecahkan masalah.
- 2) Keterampilan, yaitu kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun menyelesaikan tugas

- 3) Pemahaman, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.
- 4) Pengetahuan, yaitu informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah tertentu.

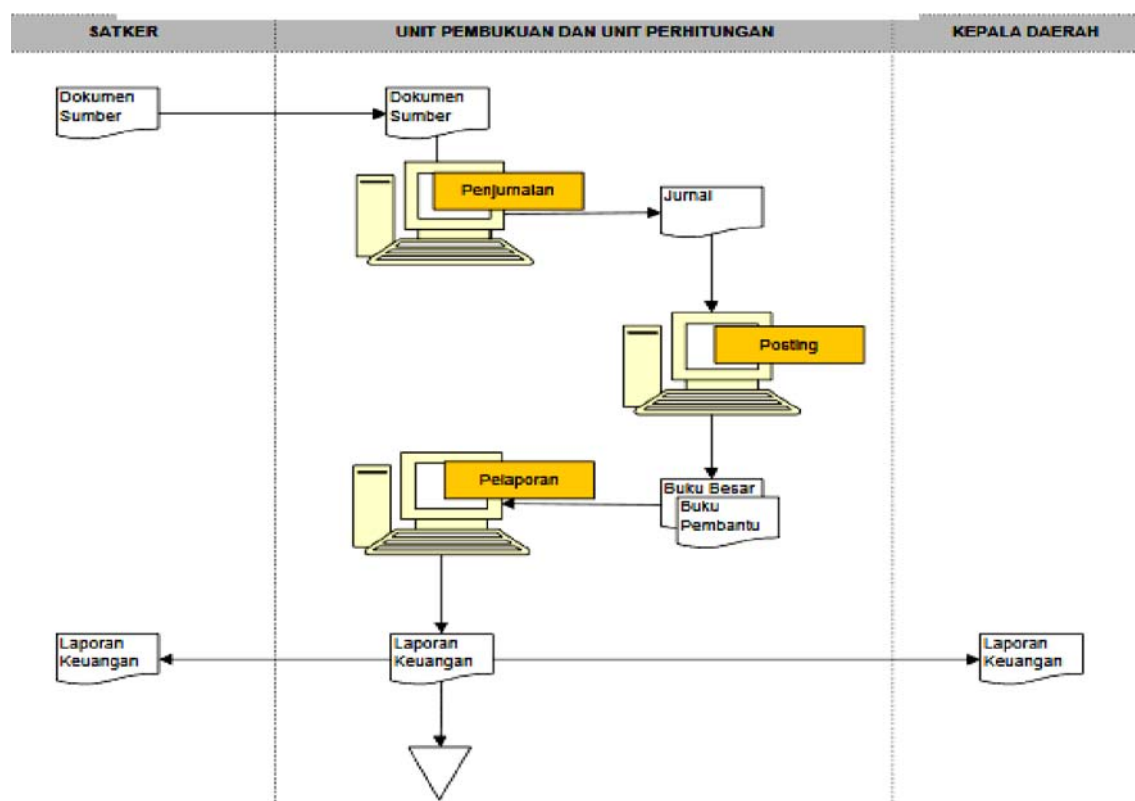
Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi pengelola keuangan daerah berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi.

2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntansi menyediakan informasi yang kuantitatif yang bersifat keuangan. Akuntansi adalah suatu sistem mengolah data, *input* (masukan) adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir dan *output* (keluaran) adalah laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 pasal 232 ayat 3 bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer yang mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan berakhir pada pelaporan keuangan yang dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah

merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal dan eksternal pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah sekurang-kurangnya meliputi: Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, Prosedur Akuntansi Selain Kas, Prosedur Akuntansi Aset tetap/barang milik daerah.

Menurut Ramadhani (2018), flowchart sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1
Flowchart Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut (Ramadhani, 2018:9):

1. Satuan Kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (DS) seperti Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Tanda Setoran (STS) dari transaksi keuangannya kepada Unit Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Unit Pembukuan dan Unit Perhitungan melakukan pembukuan bulanan DS tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (software) akuntansi.
3. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan Jurnal yang sekaligus diposting ke dalam Buku Besar dan Buku Pembantu secara otomatis setiap Satuan Kerja.
4. Bila dokumen di atas telah diverifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan proses komputer untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
5. LPJ dikirimkan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggung jawaban Satuan Kerja atas pelaksanaan anggaran, satu copy dikirim kepada Satuan Kerja yang bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen, satu copy untuk arsip Unit Perhitungan. LPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada Kepala Daerah agar dapat mengetahui keseluruhan realiasi APBD pada suatu periode.

Dalam menghasilkan laporan yang berkualitas maka setiap entitas harus membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum atau dalam internasional dikenal dengan *International Accounting Standards Board* (IASB), sekarang disebut dengan *International Financial Reporting Standar* (IFRS) sebagai syarat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam perusahaan. Sama halnya dengan perusahaan, pemerintah juga harus menghasilkan laporan keuangan dengan mengacu standar yang berlaku dalam pemerintahan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan baik (Defitri, 2018:68).

Pengaturan pengelolaan anggaran yang dapat mengacu pada ketentuan perundang-undangan pada UU Nomor 17 Tahun 2003 daftar isi tentang keuangan Negara menjelaskan bahwa Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Ketentuan perundang-undangan tersebut secara limitatif telah menjelaskan siklus pengelolaan keuangan Negara/daerah yang dimulai dari: Perencanaan, Pembahasan, Pengesahan,

Penatausahaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban. Oleh karena itu anggaran yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah haruslah dapat memenuhi keinginan masyarakat, karena bagaimanapun pemerintah merupakan pelayan masyarakat, hal ini disebabkan oleh peran penting dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat merupakan tujuan penting dari keberadaan organisasi pemerintah (Siswadhi, 2017).

Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Hal ini disebabkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Dengan menggunakan sistem akuntansi, maka resiko akan terjadinya suatu kekeliruan dan kesalahan dapat diminimalisir dalam pencatatan atau perhitungan yang dapat memungkinkan pemerintah daerah mengalami resiko yang lebih berat (Herawati, 2017).

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu sub sistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi (Defitri, 2018:68) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga hasil penelitian Wati dkk (Wati, Herawati, & Sinarwati, 2017) yang

memberikan informasi bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan demikian jika sistem keuangan daerah diterapkan dengan baik dari awal maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin lebih baik.

Romney (2017:3) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi terdiri dari lima komponen:

1. Orang-orang, yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
3. Data, tentang proses-proses bisnis organisasi.
4. Software, yang dipakai untuk memproses data organisasi.
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk computer, peralatan pendukung (*peripheral device*), dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

Romney (2017:12) menyatakan bahwa terdapat delapan unsur dari sistem informasi akuntansi yaitu :

1. Tujuan, yaitu sistem informasi akuntansi dirancang untuk mencapai satu tujuan atau lebih yang menggambarkan tenaga penggerak dibelakang sistem dan tujuannya.
2. Masukan, yaitu data harus dikumpul dan dimasukan sebagai input dalam sistem. Masukan yang umum dari suatu sistem informasi akuntansi adalah data transaksi dan jurnal.
3. Keluaran, yaitu informasi yang dihasilkan oleh sistem disebut keluaran. Keluaran yang umum dari SIA adalah laporan keuangan dan laporan-laporan internal seperti daftar piutang dagang, anggaran, dan proyeksi cashflow.
4. Penyimpanan data, yaitu data disimpan dalam sistem informasi akuntansi untuk pemakaian berikutnya. Data yang disimpan harus diperbaharui secara teratur.
5. Pengolahan, yaitu data harus diolah untuk menghasilkan informasi. Sebagian organisasi memproses data menggunakan komputer.
6. Instruksi dan prosedur, yaitu sistem informasi akuntansi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi tanpa instruksi dan prosedur secara rinci. Dalam Sistem informasi akuntansi instruksi dan prosedur untuk pemakai biasanya terdapat pada prosedur manual.

7. Pengguna, yaitu orang-orang yang berhubungan dengan sistem dan pemakai informasi yang dihasilkan disebut pengguna yang meliputi semua orang yang melaksanakan dan mencatat semua transaksi serta semua orang yang mengatur dan mengendalikan sistem.
8. Pengendalian dan pengukuran konsumen, yaitu informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem harus akurat, bebas dari kesalahan dan dilindungi dari akses-akses yang tidak sah. Pengendalian dan pengukuran konsumen dibuat dalam suatu sistem informasi akuntansi untuk menjamin informasi yang akurat dan pengoperasian sistem secara tepat.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatan, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Menurut Peraturan Pemerintah R.I Nomor 71 Tahun 2010, prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

1. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikan laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
2. Nilai Historis (*Historical Cost*)
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
3. Realisasi (*Realization*)
Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain disebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas. Apabila substansi transaksi

atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (*Periodicity*)
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.
6. Konsistensi (*Consistency*)
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Sholeh (2017;10) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas
Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik, yang mencakup kerugian daerah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. *Value for money*
Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi semakin maju, keadilan, pemerataan serta hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik
Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan pasti jumlahnya.
4. Transparansi
Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat.
5. Pengendalian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians selisih terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan, yang mencakup kekurangan penerimaan kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Tujuan penelitian terdahulu ini adalah karena peneliti ingin membandingkan perbedaan dan persamaan antara hasil-hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang akan dilakukan sekarang ini salah satunya peneliti dari Ramadhani (2018) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Staf Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris SKPD Kota Surakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sedangkan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Staf tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Defitri (2018) dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara simultan pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian dari Nazrin (2017) dengan judul Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kota Bukittinggi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Hanifa (2016) dengan judul Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara baik secara parsial maupun simultan. Artinya semakin baik kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Untuk melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ramadhania, 2018	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Staf Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris SKPD Kota Surakarta)	Independent: Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dependent: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penelitian kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sedangkan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Staf tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Variabel kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah, dan metode penelitian	Variabel pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian Intern, tempat, waktu dan subjek penelitian
2.	Defitri, 2018	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Independent: Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dependent: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penelitian kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan	Variabel sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, dan metode penelitian	Variabel pengelolaan keuangan daerah tempat, waktu dan subjek penelitian

Tabel 2.1 Lanjutan

3.	Nazrin, 2017	Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi SKPD Kota Bukittinggi)	Independent: Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dependent: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penelitian kuantitatif dan analisis regresi linier Berganda	Kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Kompetensi. penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, dan metode penelitian	Variabel pengelolaan keuangan daerah tempat, waktu dan subjek penelitian
4.	Hanifa, 2016	Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Independent: Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dependent: Kualitas Laporan Keuangan	Penelitian kuantitatif dan analisis regresi linier Berganda	Kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara baik secara parsial maupun simultan.	Variabel Kompetensi pengelola keuangan. sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, dan metode penelitian	Tempat, waktu dan subjek penelitian

Sumber: Data diolah (2022)

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Kompetensi pengelola Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi pengelola keuangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut. Hasil penelitian sebelumnya yaitu dari Ramadhani (2018) menyatakan bahwa kompetensi pengelola keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian dari Nazrin (2017) menyatakan kompetensi pengelola keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian dari Hanifa (2016) menyatakan kompetensi pengelola keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Terdapat empat karakteristik kualitas laporan keuangan menurut Undang-Undang No. 71 tahun 2010 tentang

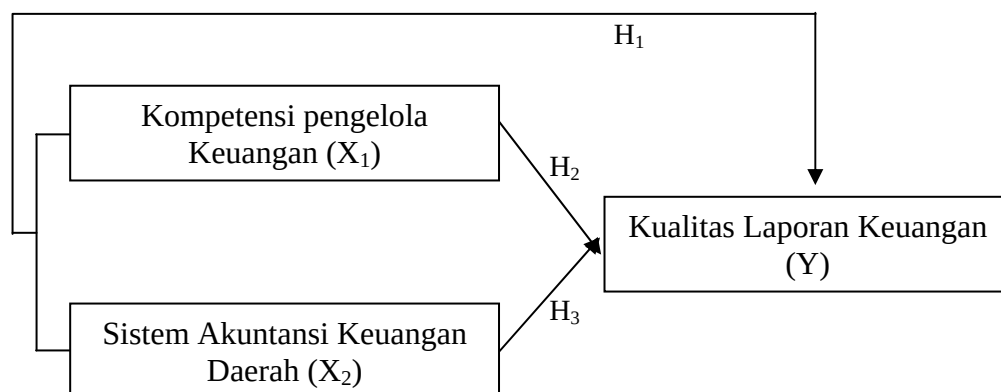
Standar Akuntansi Keuangan. Karakteristik tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2.3.2 Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan negara mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah: Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Hasil penelitian sebelumnya yaitu dari Ramadhani (2018) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian dari Defitri (2018) menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian dari Hanifa (2016) menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Kualitas informasi akuntansi keuangan tersebut tercermin dari ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat

memenuhi tujuannya. Kualitas informasi akuntansi keuangan yang andal terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Untuk itu, diperlukan adanya sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan hal yang paling penting dalam suatu perusahaan. Tanpa adanya sistem ini, maka akan sering terjadi kecurangan yang akan merugikan perusahaan itu sendiri. Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan, dan ketidaktepatan. Untuk meminimumkan bahaya ini, profesi akuntansi mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang disebut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Skema Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Berdasarkan

tujuan penelitian dan kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah:

- H₁ : Kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
- H₂ : Kompetensi pengelola keuangan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
- H₃ : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancang bangun penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Desain penelitian atau rancangan suatu penelitian harus memiliki enam aspek sebagaimana diungkapkan oleh Sekaran (2017:52), yaitu terdiri dari sifat studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, situasi studi, unit analisis, dan horizon waktu.

Penelitian ini mengacu pada rancangan penelitian yang telah dikemukakan oleh Sekaran (2017:52), berpedoman pada aspek-aspek sebagai berikut:

3.1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya bersifat menjelaskan hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran, 2017:62). Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan

salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono (2017:13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dan statistik serta bertujuan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan.

3.1.3 Horizon Waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi *pooled data* yang bersifat kuantitatif. Menurut Jogiyanto (2017:54) “panel data atau *pooled data* adalah gabungan dari data yang melibatkan satu waktu tertentu dengan banyak sampel (*cross sectional*)”. Data yang dikumpulkan hanya sekali periode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah survey lapangan yang menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada para responden yang ada di SKPD Kabupaten Aceh Besar hanya sekali waktu saja.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2017:73). Unit analisis dalam penelitian ini adalah responden bagian keuangan yang bertugas di SKPD Kabupaten Aceh Besar. Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara menggunakan kuesioner dari personal-personal para responden bagian keuangan di SKPD Kabupaten Aceh Besar.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:55) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Winarsunu, 2017:11). Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2017:85), dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pegawai SKPD Kabupaten Aceh Besar
2. Pegawai bagian keuangan
3. Bersedia menjadi sampel

Dengan demikian populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam bagian akuntansi pada SKPD Kabupaten Aceh Besar sebanyak 33 kantor. Setiap kantor diwakili 3 bagian sub keuangan, yang terdiri dari kepala sub keuangan, bendahara dan staf keuangan, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 99 orang (33×3) dari seluruh bagian keuangan di SKPD Kabupaten Aceh Besar. Namun, saat kuesioner dibagikan, responden yang mengembalikan kuesioner hanya 81 orang saja, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	SKPD	SAMPEL
1	SEKRETARIAT	
	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar	2
	Sekretaris DPRK Aceh Besar	1
	Sekretariat Majelis Adat	3
	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	3

	Sekretariat Baitul Mal	3
	Inspektur Kabupaten Aceh Besar	1
2	DINAS	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2
	Dinas Kesehatan	1
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2
	Dinas Satpol PP dan WH	3
	Dinas Sosial	3
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	3
	Dinas Lingkungan Hidup	3
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	3
	Dinas Perhubungan	3
	Dinas Pangan	3
	Dinas Komunikasi dan Informatika	3
	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	3
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2
	Dinas Pertanian	3
	Dinas Kelautan dan Perikanan	2
	Dinas Syariat Islam	3
	Dinas Pendidikan Dayah	3
	Dinas Pertanahan	3
3	BADAN	
	Badan Kesbangpol	3
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2
	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2
	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM	2
4	KANTOR	
	Kantor Pelaksana BPBD	3
Jumlah		81

Sumber: Kantor Sekretariat Daerah Kab. Aceh Besar, 2023

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data mengenai kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah, serta kualitas laporan keuangan daerah, dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan Kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner adalah tertutup yaitu berbentuk pilihan yang telah disediakan. Kuesioner terdiri dari 4 (empat) pertanyaan tentang karakteristik responden, 4 (empat) pertanyaan tentang kualitas laporan keuangan, 4 (empat) pertanyaan tentang kompetensi pengelola keuangan dan 5 (lima) pertanyaan tentang sistem akuntansi keuangan daerah.

3.4 Skala Pengukuran

Untuk mengubah data-data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner ke bentuk kuantitatif maka digunakan skala ukur yaitu skala Likert. Skala likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik (Sekaran, 2018:32). Kategori pertanyaan yang dirancang dalam kuesioner diberi nilai skor 1-5. Susunan skala likert dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Skala Likert

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang setuju	3
4	Tidak setuju	2
5	Sangat tidak setuju	1

Sumber: Sekaran, (2018:32)

3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, maka terdapat tiga variabel yang dianalisis, yaitu :

1. Variabel Dependen

Variabel Dependen atau variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas (independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan, yaitu sebuah gambaran laporan keuangan yang sudah memenuhi kriteria relevan, handal, mudah dipahami, dan dapat diperbandingkan (PP No. 71 tahun 2010). Kualitas laporan keuangan ini dapat diukur dengan menggunakan indikator, kesesuaian sistem dengan SAP, pendidentifikasian, pencatatan transaksi, bukti disetiap transaksi, dan laporan keuangan setiap periode (Nurillah, 2017:45).

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi pengelola keuangan (X_1), yaitu profesionalisme auditor sebagai hasil dari pendidikan formal maupun non formal (Sholeh, 2017:10). Kompetensi ini dapat diukur dengan indikator kemampun, keterampilan, pemahaman dan pengetahuan. Selanjutnya, Variabel independent lainnya adalah sistem akuntansi keuangan (X_2), yaitu serangkaian prosedur informasi keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, baik secara manual maupun komputerisasi (Pemendagri No. 13 Tahun 2006). Sistem akuntansi keuangan diukur melalui indikator kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pencatatan, Pengikhtisaran, dan Pelaporan.

Untuk lebih jelasnya, Variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Definisi dan Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	Item Pertanyaan
Dependen						
1	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik jika bisa memberikan informasi yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan penggunaannya. (PP No. 71 tahun 2010).	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	1-5	Likert	A1-A4
Independen						
1.	Kompetensi pengelola Keuangan (X ₁)	Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang meliputi, akuntabilitas yang berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan; dilakukan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. (UU No. 17 tahun 2003)	1. Kemampuan 2. Keterampilan 3. Pemahaman 4. Pengetahuan	1-5	Likert	B1-B4
2.	Sistem Akuntansi Keuangan (X ₂)	Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (Pemendagri No. 13 Tahun 2006)	1. Akuntanbilitas 2. <i>Value For Money</i> 3. Kejujuran 4. Transparansi 5. Pengendalian	1-5	Likert	C1-C5

Sumber: Data diolah (2022)

3.6 Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis

3.6.1 Metode Analisis

3.6.1.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan apabila model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lulus dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data harus terdistribusi normal secara normal, tidak mengandung multi kolinieritas, heterokedositas dan autokorelasi (Ghozali dan Ikhsan, 2018:158). Oleh karena itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan pengujian asumsi klasik.

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali dan Ikhsan (2018:29-30) uji normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan idependen yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri disekitar nilai means sama dengan nol. Jadi salah satu cara mendeteksi normalitas adalah lewat pengamatan nilai residual. Menurut Ghozali dan Ikhsan (2018:163) dasar pengambilan keputusan untuk melihat normal atau tidaknya data adalah:

1. Jika probabilitas $x, y > 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah normal
2. Jika probabilitas $x, y < 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah tidak normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Selanjutnya heteroskedastisitas adalah variasi data yang digunakan untuk membuat model tidak konstan atau yang menunjukkan semakin besarnya variasi seiring dengan besarnya nilai X dan Y. Heteroskedastisitas terjadi bila variasinya tidak konstan, sehingga seakan-akan ada beberapa kelompok data yang mempunyai besaran *error* yang berbeda-beda.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedestisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi ada tidak nya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidak nya pola tertentu pada grafik scatterplot. Heteroskedastisitas akan terdeteksi bila plot menunjukkan pola yang sistematis (Santoso, 2018:202).

3. Uji Multikolinearitas

Menurut Santoso (2018:281) uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi gejala kolerasi antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas lain. Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel yang dijelaskan dari model regresi. Penguji multikolinearitas didekati dengan nilai VIF (*variabel inflation factor*). Dengan kriteria:

1. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi
2. Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

3.6.1.2 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang telah disusun benar-benar akurat, sehingga mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (variabel kunci yang sedang diteliti). Validitas dalam hal ini merupakan akurasi temuan penelitian yang mencerminkan kebenaran sekalipun yang dijadikan objek pengujian berbeda (Ghozali, 2018).

Uji validitas dihitung dengan menggunakan korelasi person dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) Versi 22. Setelah dilakukan pengukuran dengan SPSS akan terlihat tingkat signifikan atas semua pertanyaan. Pengujian validitas instrumen juga dapat dilakukan dengan membandingkan dengan kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritis ($r_{hitung} > r_{Tabel}$) maka instrumen tersebut dikatakan valid.

3.6.1.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban responden atas seluruh butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan. Pengujian reliabilitas berguna untuk mengetahui apakah instrumen (kuesioner) dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama (Husen, 2015).

Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian tersebut dengan koefisien *cronbach's alpha* dengan bantuan SPSS. *Cronbach's Alpha* merupakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua. Menurut Arikunto (2015:168) secara umum suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien *cronbach's alpha* $> 0,6$.

3.6.1.4 Uji Koefisien Korelasi (R)

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan linier variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat (Santoso, 2018:240). Koefisien korelasi (R) memiliki nilai antara -1.00 hingga +1.00. Semakin R mendekati angka 1.00 maka dapat diartikan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat semakin kuat dan bersifat negatif dan juga sebaliknya.

3.6.1.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Santoso (2018:246) Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi / R^2 berada pada rentang angka nol (0) dan satu (1). Jika nilai koefisien determinasi yang mendekati angka nol (0) berarti kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi variabel mendekati satu (1) berarti kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat semakin kuat.

3.6.2 Analisis Persepsi Responden

Analisis persepsi responden berguna untuk menganalisis persepsi responden dalam menjawab setiap butir pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Peralatan analisis dan data untuk menguji persepsi responden dengan menghitung nilai rerata dan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori penilaian persepsi responden. Rentang skor dihitung dengan membagi selisih antara nilai tertinggi

dengan skor terendah dengan jumlah pilihan skor jawaban kuesioner. Secara matematis ditulis:

$$\text{Rentang skor} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8 \dots\dots\dots \text{Suryana (2015:30-31)}.$$

Selanjutnya, penggolongan persepsi responden akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Persepsi Berdasarkan Interval Skor

Rata-rata Skor	Kategori
1,00 - 1,80	Sangat tidak baik
1,81 - 2,60	Tidak baik
2,61 - 3,40	Kurang baik
3,41 - 4,20	Baik
4,21 - 5,00	Sangat baik

Sumber: (Suryana, 2015)

Untuk memberikan gambaran pencapaian dari setiap variabel penelitian ini, digunakan rentang kriteria rata-rata skor dari jawaban responden. Jika diperoleh rata-rata skor di atas 3.41, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum responden memberikan respon yang baik terhadap setiap item pertanyaan dalam kuesioner.

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kualitas laporan keuangan

X₁ = Kompetensi pengelola keuangan

X₂ = Sistem akuntansi keuangan daerah

β = Koefisien Regresi

α = Intercep/ Konstanta

ε = Epsilon/ Kesalahan estimasi

3.6.4 Pengujian Hipotesis

3.6.4.1 Uji Secara Bersama-sama (uji-f)

Dalam uji secara bersama-sama atau simultan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Ho₁ : Jika $\beta_1 = \beta_2 = 0$, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Ha₁ : Jika paling sedikit ada satu β_i ($i = 1, 2$) $\neq 0$, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

3.6.4.2 Uji Secara Parsial (uji-t)

Dalam uji secara parsial dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Ho₃ : Jika nilai $\beta_1 = 0$ maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya kompetensi pengelola keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Ha₃ : Jika nilai $\beta_1 \neq 0$ maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya kompetensi pengelola keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Ho₄ : Jika nilai $\beta_2 = 0$ maka Ho diterima dan Ha ditolak. sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Ha₄ : Jika nilai $\beta_2 \neq 0$ maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh kepala satuan kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya, misalnya: dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga dan lainnya. Kumorotomo (2015:103). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang yang mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) – SKPD.
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – SKPD.
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- g. Mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- i. Mengelola barang milik daerah atau kekayaan yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran atau pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. (Nurlan Darise, 2019:33).

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengguna anggaran, SKPD dibantu oleh:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
- d. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran (Nurlan Darise, 2019:34).

4.2. Deskripsi Variabel

Pada deskripsi variabel ini, menjelaskan skor dari pernyataan responden dari 3 variabel penelitian yang dikumpulkan melalui kuesioner, namun dari 99 kuesioner yang dibagikan kepada responden, hanya 81 responden yang dikembalikan secara lengkap, selebihnya 18 kuesioner tidak dikembalikan dan ada pula yang tidak diisi secara lengkap. Sehingga jumlah responden yang menjadi objek penelitian ini adalah 81 orang.

Tabel 4.1
Responden Penelitian Setelah Penelitian

No	Kuesioner Penelitian	Jumlah	Persentase
1.	Kuesioner yang diisi secara lengkap	81	81,82
2.	Kuesioner yang tidak dikembalikan dan tidak diisi secara lengkap	18	18,18
Jumlah		99	100

Sumber: data diolah (2023)

4.2.1 Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar dapat dijelaskan berdasarkan persepsi responden pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Indikator Kualitas Laporan Keuangan

No	Indikator	Pilihan Jawaban					Rata-rata
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
		1	2	3	4	5	
1	Relevan	0	0	15	58	8	3,91
2	Andal	0	0	14	55	12	3,98
3	Dapat dibandingkan	0	0	12	55	14	4,02
4	Dapat dipahami	0	0	5	48	28	4,28
Rerata							4,05

Sumber: Data Primer, 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 penelitian ini, nilai rata-rata persepsi responden terhadap variabel kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Aceh Besar adalah sebesar 4,05 yang bermakna bahwa kualitas laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar selama ini sudah cukup baik, sesuai dengan acuan skor rentang persepsi responden, dimana angka 4,05 berada di rentang 3,41 - 4,20. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan mengenai keuangan daerah mampu membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar dengan cukup baik, dan sebagian besar responden setuju akan hal tersebut.

4.2.2 Variabel Kompetensi Pengelola Keuangan (X₁)

Kompetensi pengelola keuangan merupakan keahlian professional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, kompetensi pengelola keuangan tersebut dapat dilihat dari persepsi responden pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Indikator Kompetensi Pengelola Keuangan

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban					Rata-rata
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
		1	2	3	4	5	
1	Kemampun	0	5	16	38	22	3,95
2	Keterampilan	0	1	19	40	21	4,00
3	Pemahaman	0	3	13	48	17	3,98
4	Pengetahun	0	0	13	41	27	4,17
Rerata							4,02

Sumber: Data Primer, 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 penelitian ini, nilai rata-rata persepsi responden terhadap variabel kompetensi pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diperoleh nilai rerata sebesar 4,02 yang bermakna bahwa kompetensi pengelola keuangan selama ini sudah baik, sesuai dengan acuan skor rentang persepsi responden, dimana angka 3,71 berada di rentang 3,41 - 4,20. Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan pernyataan mengenai kemampun, keterampilan, pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan, dimana pada pernyataan ini sebagian besar responden setuju.

4.2.3 Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂)

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Begitu juga halnya dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang selama ini ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah efektif atau belum, masih manual atau terkomputerisasi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan persepsi responden pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

No	Indikator	Pilihan Jawaban					Rata-rata
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
		1	2	3	4	5	
1	Akuntabilitas	0	1	9	54	17	4,07
2	<i>Value for money</i>	0	0	14	41	26	4,15
3	Kejujuran dalam mengelola keuangan publik	0	0	7	56	18	4,14
4	Transparansi	0	0	14	43	24	4,12
5	Pengendalian	0	2	7	49	23	4,15
Rerata							4,13

Sumber: Data Primer, 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.4 penelitian ini, nilai rata-rata persepsi responden terhadap variabel sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diperoleh nilai rerata sebesar 4,13 yang bermakna bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan selama ini sudah baik, sesuai dengan acuan skor rentang persepsi responden, dimana angka 4,13 berada di rentang 3,41 - 4,20. Hal ini

juga dapat dilihat berdasarkan pernyataan mengenai indikator sistem akuntansi keuangan daerah, dimana sebagian besar responden setuju pada pernyataan tersebut.

4.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1. Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product Moment Coefficient of Correlation* dengan bantuan program SPSS versi 22.0. Berdasarkan *out-put* komputer (lampiran *out-put* SPSS) seluruh pernyataan dinyatakan valid karena memiliki tingkat signifikansi di bawah 5%. Sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperoleh masing-masing pernyataan dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *product moment* di mana hasilnya menunjukkan semua pernyataan memiliki nilai korelasi di atas nilai kritis 5% yaitu di atas 0.277 (lihat Tabel Nilai Kritis Korelasi *r Product-Moment* untuk $n - 2 = 81 - 2 = 79$ pada lampiran *output* SPSS), sehingga pernyataan-pernyataan tersebut signifikan dan memiliki validitas konstruk, dengan kata lain terdapat konsistensi internal yang berarti pernyataan-pernyataan tersebut bersifat sama. Ini berarti bahwa data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Butir Pernyataan	Variabel	r hitung	r tabel	Status
Item 1	Y	0,536	0.277	Valid
Item 2		0,431	0.277	Valid
Item 3		0,436	0.277	Valid
Item 4		0,523	0.277	Valid

Item 1	X1	0,673	0.277	Valid
Item 2		0,859	0.277	Valid
Item 3		0,698	0.277	Valid
Item 4		0,370	0.277	Valid
Item 1	X2	0,416	0.277	Valid
Item 2		0,457	0.277	Valid
Item 3		0,546	0.277	Valid
Item 4		0,524	0.277	Valid
Item 5		0,304	0.277	Valid

Sumber : Data Primer 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid, sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan ke penelitian yang lebih mendalam, karena diperoleh nilai validitas lebih besar dari nilai kritis *product moment* sebesar 0.277 pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, sehingga instrumen data tersebut layak untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas berdasarkan *Cronbach Alpha* yang lazim digunakan untuk pengujian kuesioner dalam penelitian ilmu sosial. Analisis ini digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel yang ada. Malhotra (2010:268) menyatakan, koefisien atau nilai *Cronbach alpha* yang dapat diterima di atas 0,60. Untuk lebih jelas besarnya nilai alpha pada masing-masing variabel diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Reliabilitas Variabel Penelitian (Alpha)

No	Variabel	Nilai Alpha	Kriteria	Status
1.	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.696	0.60	Reliable
2.	Kompetensi Pengelola Keuangan (X_1)	0.797	0.60	Reliable
4.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)	0.703	0.60	Reliable

Sumber: Data Primer 2023 (diolah)

Uji reliabilitas terhadap 3 (tiga) atribut pertanyaan yang terlibat dalam masing-masing variabel kompetensi pengelola keuangan (X_1), Sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) dan Kualitas laporan keuangan (Y) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel 4.5 diperoleh nilai alpha masing-masing sebesar 0.696, 0.797 dan 0.703, dengan demikian nilai-nilai dari atribut yang terlibat dalam pengukuran variabel tersebut memenuhi kredibilitas *Cronbach's Alpha* karena nilai alpha melebihi dari 0,60.

4.4. Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Pengujian asumsi normalitas untuk menguji data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Jika distribusi data normal, maka analisis data dan pengujian hipotesis digunakan statistik parametrik. Pengujian normalitas data menggunakan uji kolmogorov-smirnov *one sampel test* dengan kriteria uji: jika probabilitas signifikan $< 0,05$ maka data berdistribusi normal. Pengolahan data dalam penelitian ini memperoleh hasil seperti terlihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Uji Normalitas

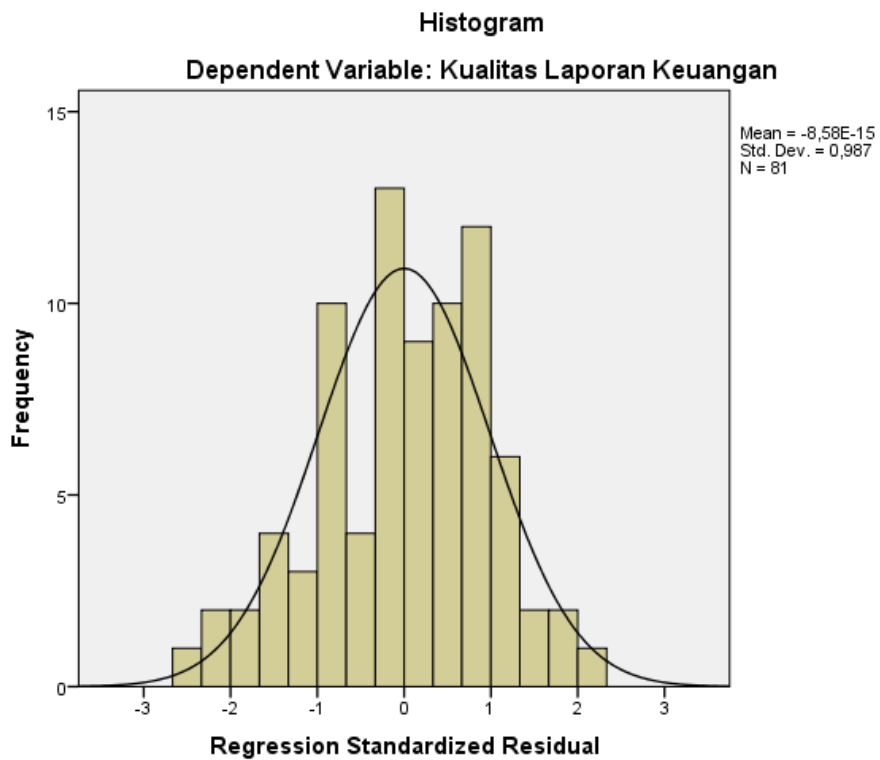
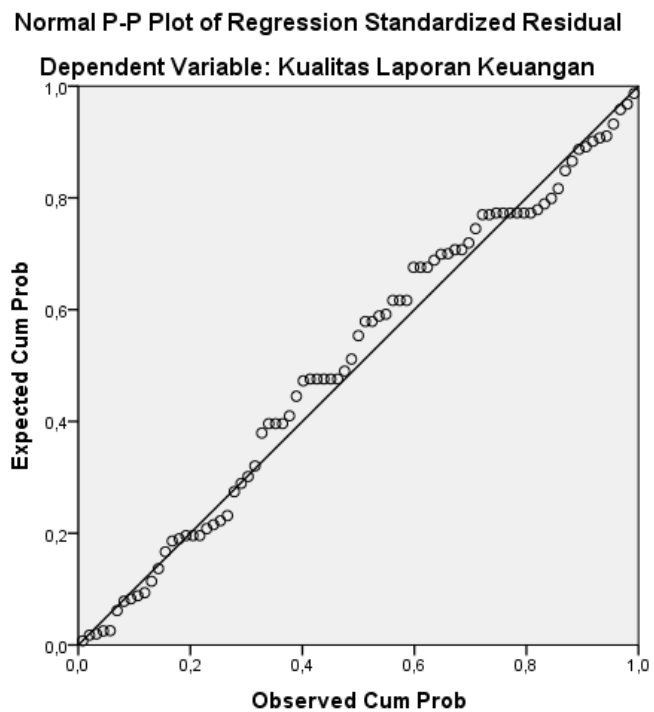
Normalitas	Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,085
Sig.	0,200

Sumber: Data Primer, 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan dari variabel-variabel penelitian adalah sebesar 0,200. Hal ini berarti nilai signifikansi tersebut lebih besar dari nilai α (0,05), ini berarti seluruh data berdistribusi normal. Selain itu, dasar pengambilan keputusan uji normalitas lainnya juga dilakukan berdasarkan grafik histogram dan grafik p-plot. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- Data dikatakan berdistribusi normal, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya.
- Sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal, jika data menyebar jauh dari arah garis dan tidak mengikuti diagonal grafik histogramnya.

Histogram di atas memperlihatkan bahwa distribusi tersebut berada pada kategori normal karena tepat berada di tengah, dan tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan, grafik histogram di atas terlihat menyebar ke samping kanan dan kiri secara merata, dan juga tidak menyebar jauh dari arah garis diagonalnya.



Berdasarkan tampilan *output chart* kita dapat melihat grafik p-plot. Selanjutnya, pada gambar P-Plot terlihat titik-titik mendekati mengikuti data di

sepanjang garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan/pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Pedoman pengambilan keputusan pada uji multikolinieritas, yaitu:

A. Berdasarkan nilai tolerance

1. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi
2. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

B. Berdasarkan nilai VIF

1. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi
2. Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Tabel 4.8
Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas

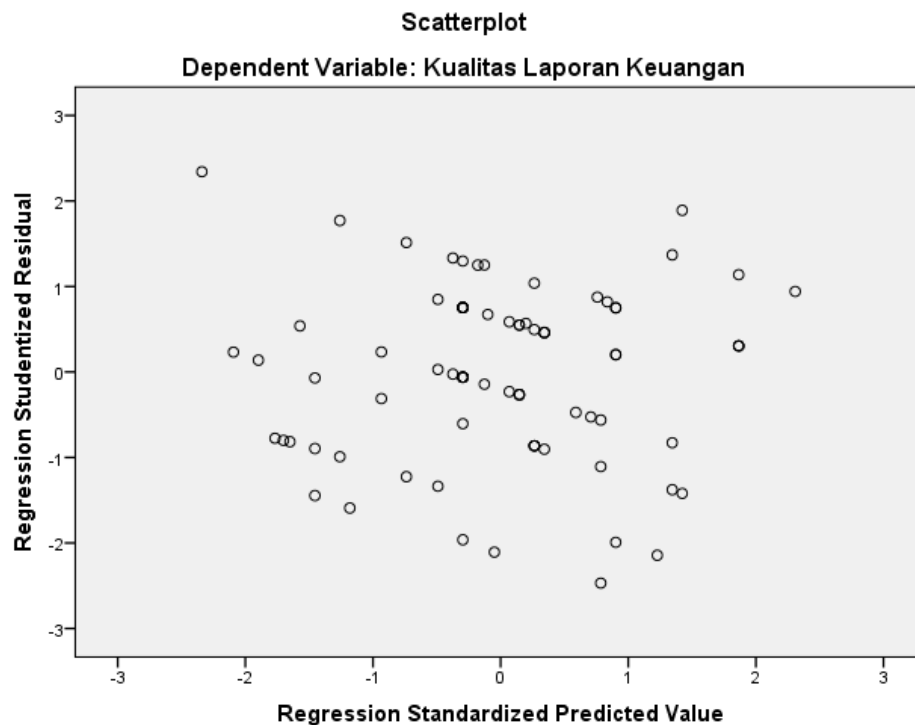
Variabel	Kolinieritas	
	Tolerance	VIF
Kompetensi Pengelola Keuangan (X_1)	00,481	2,080
Efektivitas Fungsi Anggaran (X_2)	0,481	2,080

Sumber: Data Primer, 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil output uji multikolinieritas pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai tolerance keseluruhan variabel lebih besar dari 0,10; dan nilai VIF dari keseluruhan variabel lebih kecil dari 10,00. Dengan demikian, mengacu pada dasar pengambilan keputusan uji multikolinieritas di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada keseluruhan variabel tersebut.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi lainnya. Jika residual mempunyai varians yang sama, disebut homoskedastisitas. Dan jika tidak sama disebut heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Analisis uji ini menggunakan SPSS melalui grafik *scatterplot* antara *Z prediction* (ZPRED) untuk variabel bebas (sumbu X=Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y=Y prediksi – Y riil). Homoskedastisitas terjadi jika titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah ataupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang tertentu. Hasil olah data untuk uji homoskedastisitas tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Dari hasil output gambar *scatterplot*, didapat titik-titik menyebar di bawah serta di atas sumbu Y, dan tidak mempunyai pola yang teratur. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel bebas di atas tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antar observasi satu ke observasi lain. Pengujian ini dilakukan dengan mengamati grafik scatter plot pada output SPSS, di mana menurut Priyatno (2019:88) adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika titik-titiknya membentuk pola tertentu yang teratur maka diindikasikan terdapat masalah heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4.5. Analisis Regresi Linier Berganda

4.5.1 Pengaruh Variabel Independent Terhadap Variabel Dependent

Seperti dikemukakan pada rumusan masalah dan hipotesis penelitian yaitu menganalisis variabel kompetensi pengelola keuangan (X_1) dan sistem akuntansi keuangan daerah (X_2), sebagai variabel bebas (independent variabel) baik secara simultan maupun parsial, maka untuk menjelaskan didasarkan kepada analisis regresi linier berganda seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9
Pengaruh Masing-masing Variabel Bebas Terhadap Variabel terkait

Model		B	Ustandardized Coefficients		t hitung	Sig
			Std. error	Beta		
1	(Constant)	2,251	0,469		4,805	0,000
	Kompetensi pengelola keuangan (X_1)	0,166	0,101	0,097	1,643	0,035
	Sistem akuntansi keuangan daerah (X_2)	0,376	0,161	0,346	2,333	0,022
	Koefisien korelasi	0,521	a. Jumlah data 81 responden b. Prediktor variabel karakteristik kualitatif kompetensi pengelola keuangan (X_1) c. Prediktor variabel karakteristik kualitatif sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) d. Variabel dependen: kualitas laporan keuangan Pemkab Aceh Besar			
	R square	0,271				
	F hitung	8,405				
	F tabel	3,115				
	Sig F	0,000				

Sumber : Data Primer, 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil output komputer melalui program SPSS, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 2,251 + 0,166 + 0,376$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan hasil penelitian sebagai berikut :

4.5.2. Koefisien Regresi (β)

1. Koefisien konstanta sebesar 2,251. Artinya bilamana variabel, Kompetensi pengelola keuangan (X_1) dan Sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) dianggap konstan, maka besarnya kinerja sebesar 2,251 satuan skala.
2. Besarnya koefisien variabel kompetensi pengelola keuangan sebesar 0,166 artinya setiap kenaikan 100% perubahan dalam variabel Kompetensi pengelola keuangan secara relatif akan meningkatkan Kualitas laporan keuangan Pemkab Aceh Besar sebesar 16,60% dengan asumsi variabel Sistem akuntansi keuangan daerah dianggap konstan.
3. Besarnya koefisien variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,376 artinya setiap kenaikan 100% perubahan dalam variabel Sistem akuntansi keuangan daerah secara relatif akan meningkatkan Kualitas laporan keuangan Pemkab Aceh Besar sebesar 37,60% dengan asumsi variabel Kompetensi pengelola keuangan dianggap konstan.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) variabel independent yang diteliti, diketahui bahwa keduanya memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar, sedangkan pengaruh yang dominan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar dari kedua variabel independen tersebut adalah variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X_2).

4.5.3. Koefisien korelasi (R) dan determinasi (R^2)

Sedangkan untuk melihat hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan korelasi dan determinasi seperti dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Tabel Model Summary

R	R²	Adjusted R²	Std. Error of the estimate	Keterangan
0,521	0,271	0,256	0,3709	Korelasi sedang

Sumber : Data Primer, 2023 (diolah)

Tabel 4.9 memperlihatkan koefisien korelasi (R) = 0,521 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 52,10%. Artinya kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar memiliki korelasi sedang dengan kompetensi pengelola keuangan (X_1) dan sistem akuntansi keuangan daerah (X_2).

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,271. Artinya sebesar 27,10% kompetensi pengelola keuangan (X_1) dan sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar.

4.5.4. Pengujian Secara Parsial (Uji-t)

Uji parsial digunakan untuk menguji kemaknaan parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Hasil perhitungan yang diperlihatkan pada tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11
Uji Parsial (t-test)

No	Variable Independen	β	t	Sig.
1.	Kompetensi pengelola keuangan (X_1)	0,166	3,464	0,001
2.	Sistem akuntansi keuangan daerah (X_2)	0,376	7,861	0,000

Sumber : Data Primer, 2023 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan variabel faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar, secara parsial, antara lain :

1. Variabel Kompetensi pengelola keuangan

Hasil penelitian terhadap variabel Kompetensi pengelola keuangan (X_1) diperoleh nilai koefisien $0,166 \neq 0$ dan juga t_{hitung} (3,464) dan t_{tabel} (1,990) (lihat Lampiran 4 Tabel Titik Kritis uji-t). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi sebesar 0,001 atau probabilitas di bawah $\alpha = 5\%$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menerima H_{a1} , dan menolak H_{o1} . Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel kompetensi pengelola keuangan (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar.

2. Variabel Sistem akuntansi keuangan daerah

Hasil penelitian terhadap variabel Sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) diperoleh nilai koefisien $0,166 \neq 0$ dan juga t_{hitung} (7,861) dan t_{tabel} (1,990). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi sebesar 0,000 atau probabilitas di bawah $\alpha = 5\%$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menerima H_{a2} , dan menolak H_{o2} . Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar.

4.4.5. Pengujian Secara Simultan (Uji-F)

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu pengawasan intern mempunyai pengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12
Analisis of Variance (Anova)

Model	Sum of Squares	df	Mean Squares	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig
Regresi	5,884	2	2,942	8,405	3,115	0,000
Residual	4,727	78	0,061			
Total	10,611	80				

Sumber : Data Primer, 2023 (diolah)

Pengujian dilakukan dengan Anova yang membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada tabel 4.12 menunjukkan F_{hitung} sebesar 8,405, sedangkan F_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 3,115 (lihat Lampiran 4 Tabel Titik Kritis uji-F). Dari perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8,405 > 3,115$), selain itu juga dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 2,251 atau tidak sama dengan nol, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menerima H_{a3} (Hipotesis alternative) dan menolak H_{o3} (Hipotesis nol), artinya bahwa variabel Kompetensi pengelola keuangan (X_1) dan Sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar.

Dengan demikian terbukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara, Kompetensi pengelola keuangan (X_1) dan Sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar, dengan demikian

hipotesis alternatif (H_{a3}) yang diajukan diterima dan menolak hipotesis nol (H_{o3}), karena diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan tingkat probabilitas *Sig* (0,000).

4.5.6. Pembuktian Hipotesis

Analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan perhitungan program komputerisasi SPSS versi 22.0 diperoleh persamaan regresi:

$$Y = 2,251 + 0,166 (X_1) + 0,376 (X_2)$$

Untuk menguji signifikansi dari persamaan regresi linier tersebut digunakan analisis varian untuk regresi. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $8,405 > 3,115$, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan.

Hubungan antara variabel independent (X_1 dan X_2) dengan kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar (Y) dapat diketahui dari nilai koefisien korelasi. Berdasarkan hasil analisis dengan program komputasi SPSS versi 22.0 diperoleh koefisien korelasi atau R sebesar 0,521. Selanjutnya koefisien korelasi tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil uji-t kedua variabel sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar, dimana nilai t_{hitung} dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari t_{tabel} (1,990).

Besarnya pengaruh atau kontribusi yang diberikan oleh pengaruh variabel kompetensi pengelola keuangan dan Sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi atau R^2 . Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai $R^2 = 0,271$ yang

berarti besarnya pengaruh Kompetensi pengelola keuangan dan Sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar adalah sebesar 27,10%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa selain variabel Kompetensi pengelola keuangan dan Sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar juga dipengaruhi variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini sebesar 72,90%.

Dalam penelitian ini jelas, bahwa kompetensi pengelola keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, khususnya Kabupaten Aceh Besar. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi pengelola keuangan dapat memberikan dukungan terhadap kualitas laporan keuangan daerah sehingga lebih terukur, terstruktur dan dapat dibandingkan.

Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Hervesi, 2015:45). Sumber daya manusia dalam hal ini pengelola keuangan, jika tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat, hal ini karena pengelola keuangan tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan dengan demikian laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas (Mardiasmo, 2014: 146).

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Terdapat empat karakteristik kualitas laporan keuangan menurut Undang-Undang No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan. Karakteristik tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut. Kompetensi pengelola keuangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan.

Hasil penelitian sebelumnya yaitu dari Ramadhani (2018) menyatakan bahwa kompetensi pengelola keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian dari Nazrin (2017) menyatakan kompetensi pengelola keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian dari Hanifa (2016) menyatakan kompetensi pengelola keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya kualitas laporan keuangan juga ditentukan baiknya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diterapkan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan juga tidak baik (Mardiasmo, 2016:35).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Sedangkan dalam permendagri No. 13 Tahun 2006 diungkapkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak tepat, pihak aparatur akan mudah melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Meluasnya praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan birokrasi publik semakin mencoreng image birokrasi publik dimata masyarakat. Disadari bahwa

kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti : prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang reponsif dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintah (Wati, 2017).

Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Hasil penelitian sebelumnya yaitu dari Ramadhani (2018) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian dari Defitri (2018) menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian dari Hanifa (2016) menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara simultan membuktikan bahwa, kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar ($\beta 2,251 \neq 0$).
2. Secara parsial menandakan adanya pengaruh variabel kompetensi pengelola keuangan (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar ($\beta 0,166 \neq 0$).
3. Secara parsial hasil uji t menandakan adanya pengaruh variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar ($\beta 0,376 \neq 0$).
4. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,271. Artinya kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar dipengaruhi oleh kompetensi pengelola keuangan (X_1) dan sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) sebesar 27,10%.

5.2. Keterbatasan

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada lingkungan SKPD Kabupaten Aceh Besar saja, dan hanya dalam satu kurun periode saja.
2. Penelitian ini masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar, seperti faktor motivasi kerja, faktor pemberian insentif, faktor komitmen organisasi, faktor pendidikan dan pelatihan, serta faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kinerja pegawai.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, peneliti menyarankan bahwa dalam rangka kompetensi pengelola keuangan di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yaitu:
 - a. Perlu adanya percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya, seperti peningkatan konektivitas jaringan SIMDA, peningkatan kemampuan pemahaman akuntansi akrual, tidak hanya definisi akrual saja tetapi lebih kepada kemampuan menganalisa dan memahami permasalahan-permasalahan terkait akuntansi akrual.
 - b. Selain itu diklat yang diadakan harus lebih mengedepankan praktek di lapangan untuk memenuhi kebutuhan SDM karena masih terbatasnya formasi SDM yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi, dapat dipenuhi terlebih dahulu dengan tenaga kerja lulusan akuntansi perguruan tinggi, dan diperbanyak diklat-diklat terkait pengelolaan keuangan.

- c. Sedangkan dalam aspek IT, diperlukan percepatan pengembangan aplikasi keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan secara akrual dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi lain seperti aplikasi pengelolaan pendapatan dan aplikasi pengelolaan aset.
2. Bagi peneliti lain yang akan melanjutkan penelitian ini, diharapkan untuk dapat meneruskan dan mengembangkan penelitian ini pada masa yang akan datang dengan lebih komprehensif, melalui penelitian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dikarenakan variabel-variabel bebas dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat di atas 90%, penelitian ini hanya mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat sebesar 55,50%. Dalam penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel bebas, seperti insentif dan pelatihan, agar menghasilkan penelitian baru yang dapat membantu perusahaan, lembaga atau instansi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2015). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Defitri, Siska Yulia. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita* Vol. 3, No. 1, Hal 64-75
- Erlina., Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah. Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS*. Edisi Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanifa, Lia. (2016). Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* Volume 1, Nomor 2.
- Harahap, S. S. (2017). *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada
- Hardyansyah. (2016). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Polewali Mandar)*. Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
- Herawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *STAR-Study & Accounting Research*, XI(1), 1–14.
- Hervesi, (2005). *Standar Kontrol Internal pada Pemerintahan*. Terjemahan Anugerah. Surabaya: Universitas Airlangga Press
- Husein Umar. (2015). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Yogyakarta. Pustaka Baru.
- Ihsanti, E. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *Jurnal Akuntansi Keuangan* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Vol. 1 Nomor. 2, Hal 1-7.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), (2017). *Standar Professional Akuntan Publik (SPAP)*, Jakarta: Salemba Empat

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah
- Mahmudi. (2017). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Malhotra, N.K. (2017). *Riset Pemasaran*. Jakarta: PT. Indeks.
- Mardi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mulyadi. (2012). *Auditing*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Nazrin, Putra Mhd. (2017). Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kota Bukittinggi). *JOM Fekon*, Vol. 4 No. 1
- Notoatmodjo, S. (2017). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurillah, S. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Naskah Publikasi*, Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- Permendagri. Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 64 Tahun 2013 *Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Rahayu, L. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada SKPD Pemerintah Provinsi Riau. *JOM FEKON*, 1 (2), 1-11
- Rahayu, S. K. & Ely, S. (2017). *Auditing*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ramadhani, Abdul Aziz. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Staf Terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta). *Jurnal Akuntansi Keuangan* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Rifai, Veithzal. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Romney, B. M. dan Paul, J. S. (2017). *Accounting Information System*. Jakarta : Salemba Empat.

Rosanti, D.I. (2017). Pengaruh Pendidikan, Kompetensi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Lati Prayogi. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen* Vol. 3 No. 11, Hal 1-13

Santoso, Singgih. (2018). *Menguasai statistik dengan SPSS*. Jakarta: Elexmedia. Komputindo.

Sedarmayanti. (2017). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.

Sekaran, U. (2018). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Setyowati, Lilis. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Jurnal Kinerja*, Volume 20, No.2, Th. 2016: Hal. 179-191

Siswadhi, F. (2017). Pengaruh Pengembangan Karir dan Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh. *Jurnal Benefita*, 2(1), 72–80.

Sholeh, Chabib. (2017). *Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Bandung*. Fokus Media

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta

Sunyoto, D. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : CAPS.

Supranto, M.A. (2017). *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sutrisno , E. (2017). *Budaya Organisasi*. Jakarta : Kencana

Suwatno. & Priansa, D. (2017). *Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1–11.

Wibowo, G. P. (2017). Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasional Karyawan Ud. Ulam Sari Denpasar. *Jurnal Program Magister Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar*

Wicaksono, T. (2017). Pengaruh Kecerdasan Emosi, Kompetensi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin). *Jurnal Ekonomi Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Vol. 1 Nomor. 2, Hal 1-15.*

Wulandari. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gerbang Media.

Yosefrinaldi. (2016). Pengaruh kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat). *Jurnal FEBI*, Universitas Negeri Padang.

Yuhanis Ladewi. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. Palembang: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Yusriadi. (2017). Pengaruh Kompetensi Profesional Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Dosen Pada Universitas Malikussaleh. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Vol. 1 Nomor. 2, Hal 1-12.*

KUESIONER

**PENGARUH KOMPETENSI PENGELOLA KEUANGAN
DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR**

No. Responden:.....

I. Petunjuk Pengisian

Responden yang terhormat, bersama ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data kuesioner yang diberikan. Informasi yang Bapak/Ibu berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi saya. Oleh karena itu kepada responden, saya sebagai penulis mengharapkan:

1. Bapak/Ibu menjawab setiap pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, dan perlu diketahui bahwa jawaban Bapak/Ibu tidak berhubungan dengan benar atau salah
2. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda *checklist* (✓) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.
3. Setelah melakukan pengisian, mohon Bapak/Ibu menyerahkan kepada pemberi kuesioner

II. Identitas Responden

1. Nama Bapak/Ibu :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :
 - a. Diploma
 - b. S-1 (sarjana)
 - c. Pascasarjana
5. Lama Bekerja :

III. Pertanyaan tentang Variabel

A. Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No.	Item Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja, telah menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan dan disajikan tepat waktu					
2.	Laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja, telah menghasilkan informasi yang jujur sesuai transaksi yang terjadi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan.					
3.	Informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat Saya bekerja, telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dapat dibandingkan secara internal maupun eksternal					
4.	Laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja, dilakukan dengan analisis dan identifikasi transaksi dengan istilah yang sesuai dengan pemahaman para pengguna.					

B. Variabel Kompetensi Pengelola Keuangan

No.	Item Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Sumber daya manusia pada instansi tempat Saya bekerja telah memiliki kemampuan dan mampu menyusun LKPD sesuai Standar Akuntansi					
2.	Adanya pelatihan untuk membantu penguasaan dan keterampilan sehingga keahlian SDM di instansi saya semakin berkembang					
3.	Pada instansi Saya, Sub bagian keuangan/akuntansi telah memahami struktur organisasi pada instansi tersebut.					
4.	Sub bagian keuangan/akuntansi pada instansi saya sering mendapatkan sosialisasi atau diklat jika ada peraturan baru tentang keuangan daerah, sehingga pengetahuan mereka selalu bertambah					

C. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

No.	Item Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Telah diterapkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku pada instansi tempat Saya bekerja.					
2.	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan untuk penilaian investasi atas kepemilikan non-permanen.					
3.	Laporan keuangan pada instansi saya bekerja, telah menghasilkan informasi yang jujur sesuai transaksi yang terjadi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan.					
4.	Informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja telah transparan dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.					
5.	PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dapat mencegah kecurangan dan penyelewengan telah diimplementasikan pada instansi saya bekerja.					